

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Interaksi antar negara merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya komunikasi maka negara dapat berkoordinasi antara negara satu dengan negara yang lain. Oleh sebab itu dalam hubungan ekonomi setiap negara telah melakukan kerjasama agar dapat bertahan di era globalisasi. Perbedaan kapasitas dan kuantitas sumber daya alam yang dimiliki setiap negara dan perbedaan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki merupakan gambaran kekuatan suatu negara. Berawal dari berakhirnya Perang Dingin dapat dikatakan sebagai pertanda kemenangan kapitalisme dan meningkatnya dominasi ekonomi pasar bebas di dunia internasional. Pada periode pasca Perang Dingin, dominasi ekonomi pasar dapat dilihat dari banyaknya perjanjian perdagangan regional yang ditandatangani oleh banyak negara. Misalnya, tercatat hingga saat ini ASEAN memiliki tujuh perjanjian perdagangan bebas yang telah berjalan diantaranya, *ASEAN Free Trade Agreement*; *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*; *ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement*; *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*, *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation Agreement* dan *ASEAN-India Free Trade Area*.<sup>1</sup> Perjanjian tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan. Sampai saat ini perdagangan bebas merupakan issue yang kontroversial khususnya di negara-negara berkembang.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 50% (21 juta ton per tahun) konsumsi CPO di dunia.<sup>2</sup> Kelapa sawit terbagi atas dua bagian yaitu *crude palm oil*

---

<sup>1</sup> Widyasanti, Amalia Adininggar. 2010. *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, hal 7

<sup>2</sup> Kementerian Perdagangan, "Kajian Pengembangan Kontrak Berjangka CPO", diakses melalui <http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1038.html> tanggal 5 Agustus 2014, pukul 11.45 WIB

(CPO) dan minyak inti. Keduanya kemudian dikembangkan dan menghasilkan beberapa produk turunan seperti *palm oil*, *RBD palm oil*, *crude palm stearin*, *palm karnel* dan *palm oil mill*. Akan tetapi, dalam perkembangannya CPO merupakan jenis kelapa sawit yang paling banyak di produksi dan berpengaruh pada perkembangan industri kelapa sawit. Indonesia telah menjadi negara penghasil CPO terbesar. Selain Indonesia, negara lain yang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia antara lain Malaysia, Thailand, Nigeria dan Columbia. Pada tahun 2011, Indonesia mampu menghasilkan 23.900 ribu ton atau 40,27% dari total produksi minyak sawit dunia sebesar 50.894 ribu ton, sementara Malaysia 40,26%, Thailand 2,78%, Nigeria 2,03%, dan Columbia 1,80% (Kementerian Pertanian, 2012). Adapun negara konsumen CPO Indonesia yaitu India, Cina dan Uni Eropa.

Pada tabel 1 menjelaskan tentang produk utama ekspor Indonesia ke India pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebelum di berlakukannya ASEAN – India free Trade Area (AIFTA) di Indonesia.

**Table 1: Produk Ekspor Terbesar Indonesia ke India tahun 2008-2009 (dalam miliar dolar)**

No	Komoditi Ekspor	2008	2009
1	Palm oil	4,109	3,330
2	Coal	1,232	1,950
3	Copper ores	272	273
4	Coconut (copra)	140	150
5	Natural rubber	71	125

Sumber: Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Perjanjian Kerjasama Ekonomi Indonesia-India 2010, Jakarta.

Tabel di atas menunjukkan bahwa dua komoditas ekspor utama Indonesia ke India pada tahun 2008 dan 2009 adalah minyak sawit dan batu bara, biji tembaga lalu diikuti oleh kopra, dan karet (yang relatif kurang penting dibandingkan minyak sawit

dan batu bara). Hal ini juga harus diperhatikan bahwa produk ekspor utama Indonesia ke India adalah komoditas primer.

Salah satu negara yang menjalankan kebijakan perdagangan bebas dan terlibat dalam beberapa perdagangan bebas regional adalah India. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri India, sampai dengan tahun 2005, India setidaknya terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas regional dengan lima organisasi regional.<sup>3</sup> Salah satu organisasi regional yang menjadi mitra India dalam perjanjian perdagangan bebas regional adalah *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).<sup>4</sup>

Indonesia – India *Joint Study Group* (JSG) menghasilkan dan merekomendasikan ASEAN – India *Free Trade Agreement* (AIFTA) dan Indonesia – India *Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (II CECA) untuk mencapai kemitraan komprehensif. Kedua menteri dari kedua negara juga sepakat untuk membentuk forum dialog G-to-G di tingkat menteri yang akan bertemu setiap tahun. Forum ini akan digunakan untuk mencari solusi untuk setiap masalah yang timbul dari kendala yang dihadapi pengusaha Indonesia dan India serta memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi antara kedua negara (Humas Pusat, Departemen Perdagangan, 2010).

Penelitian ini akan fokus pada perdagangan *crude palm oil* (CPO) karena penulis melihat perkembangan yang signifikan dalam perdagangan CPO antara Indonesia – India setelah di berlakukannya ASEAN - India *Free Trade Area* (AIFTA) periode 2010 - 2013. Bagi Indonesia, AIFTA memiliki arti penting karena melalui perjanjian inilah Indonesia dapat mengamankan tingkat tariff CPO dan RPO di India secara bertahap ke tingkat maksimum masing-masing 37,5% dan 45% pada tahun

---

<sup>3</sup> Perjanjian tersebut antara lain (selain dengan ASEAN); *Framework Agreement on the BIMST-EC FTA*; *Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)*; *Framework Agreement on India-MERCOSUR FTA*; *India-Southern African Customs Union Framework Agreement*. Dikutip dari Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Trade and Industry, India diakses dari <http://dgft.delhi.nic.in/> pada 24 April 2014 pukul 11.40 WIB

<sup>4</sup> ASEAN dibentuk melalui Deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Anggota awalnya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam bergabung kedalam ASEAN. ASEAN kini memiliki empat Summit-level Dialogue Partners yaitu China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Selain itu ASEAN juga memiliki sejumlah Full Dialogue Partners dan Sectoral Dialogue Partners.

2018. Sikap optimisme dari ASEAN dan Indonesia cukup beralasan karena selama ini India dikenal sebagai pasar yang sangat protektif. Melalui AIFTA, India memiliki komitmen untuk menurunkan dan menghapuskan sebagian besar tarifnya dalam kurun waktu 2010-2018. Bila pada tahun 2005 perdagangan kedua negara baru mencatat nilai sebesar US\$ 2,8 miliar, pada tahun 2008 nilai perdagangan ini meningkat menjadi US\$ 9 miliar dengan posisi surplus di pihak Indonesia sebesar US\$ 4 miliar.<sup>5</sup> Sebelum diberlakukannya AIFTA, bea masuk diatur oleh India. Pada 2008 dan 2009 bea masuk CPO hampir pada presentase tertinggi yaitu mencapai 80% sampai dengan 90%.

Dengan diberlakukannya ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2010, 94,75% dari ekspor Indonesia ke India (US\$ 2.6 milyar) akan menikmati peningkatan akses pasar dalam 9 tahun kedepan. Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia mengingat produk andalan Indonesia, minyak sawit akan memperoleh *actual market acces* sampai dengan tahun 2019.<sup>6</sup> India merupakan pangsa pasar yang penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk India yang berjumlah sekitar kurang lebih 1 milyar jiwa maka konsumsi India akan terus meningkat.

Kerjasama ASEAN - India yang dibina pada tahun 1990-an sebagai tujuan dari *look east policy* India yang mengisyaratkan bahwa India mulai berangkat dari ketergantungan eksklusifnya yang tertutup menuju kepada kebijakan ekonomi yang lebih terbuka (menandai fase baru hubungan antara India - ASEAN melalui pendekatan multilateral serta terus aktif dan berpartisipasi dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh ASEAN). Kebijakan *look eas policy* India menjadi pilar penting dalam menjalin hubungannya dengan ASEAN. bersama dengan program liberalisasi dan reformasi ekonomi hal ini telah menjadi penting tidak hanya berkaitan dengan arus perdagangan barang, tetapi juga dalam perdagangan jasa.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dirjen Kerjasama Industri Internasional, Januari 2012. Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri (s.d. 2011). Hal 24

<sup>6</sup> Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri (s.d. 2011), *Op.Cit*

<sup>7</sup> Nambiar, Shankaran, "India's Engagement with ASEAN: Beyond Trade in Goods", *ISAS Working Paper*, No. 129, 26 Agustus 2011. Notional University of Singapore, hal 2 Dalam [http://tic.car.chula.ac.th/images/book\\_s/86526/86526P.pdf](http://tic.car.chula.ac.th/images/book_s/86526/86526P.pdf) Diakses pada tanggal 21 April 2014 pukul 16.02 WIB

Dengan adanya kebijakan *look east policy*, India terus berupaya agar kepentingannya dibidang ekonomi tetap berjalan dengan terus membina hubungan dengan ASEAN dengan turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN dan membuat kerangka kerjasama AIFTA. Hubungan kerjasama ASEAN - India secara resmi telah terjalin sejak tahun 1992, diawali dengan dialog sektoral pada tahun 1992, yang kemudian mendapat status sebagai mitra wicara penuh pada bulan Desember 1995 dan menjadi anggota ASEAN *Regional Forum* (ARF) pada tahun 1996.<sup>8</sup> ASEAN *Regional Forum* (ARF) merupakan forum utama dialog keamanan di Asia.<sup>9</sup> India memandang ARF sebagai proses yang berharga dalam rangka meningkatkan hubungan yang stabil dengan negara-negara *major power*.<sup>10</sup> Peristiwa paling signifikan dalam hubungan India - ASEAN terjadi pada November 2001 ketika para kepala negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan interaksi dengan India ke tingkat *Summit*. Status India kembali mengalami peningkatan, ketika India menjadi Mitra Konfrensi Tingkat Tinggi (*Summit Partner*) bagi ASEAN. India - ASEAN *Summit* memungkinkan India untuk terlibat lebih jauh dengan ASEAN dan untuk memainkan peran aktif dalam memperkuat proses *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).<sup>11</sup>

Pada 5 November 2002 diadakan ASEAN - India *summit* yang pertama kalinya di Kamboja. Dalam pertemuan tersebut baik ASEAN maupun India telah sepakat mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi dan bekerja menuju ASEAN - India *Regional Trade and Investment Area* (RTIA) sebagai tujuan jangka

<sup>8</sup> Shinoj, P. "India-ASEAN Trade in Agriculture: Retrospect and Prospect" February 2009. Diakses melalui [http://www.ncap.res.in/upload\\_files/policy\\_brief/pb29.pdf](http://www.ncap.res.in/upload_files/policy_brief/pb29.pdf). Pada tanggal 21 April 2014 pukul 16.25 WIB

<sup>9</sup> ASEAN *Regional Forum* (ARF) didirikan pada tahun 1993 terdiri dari 27 negara yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) serta 10 negara mitra dialog ASEAN (Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, New Zealand, Republic of Korea, Rusia dan Amerika Serikat) termasuk negara-negara pengamat ASEAN seperti Republik of Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Mongolia, Timor Leste, Bangladesh dan Sri Lanka.

<sup>10</sup> "Association of Southeast Asia Nations and India", diakses dari <http://exim.indiamart.com/free-trade-agreement/asean-india.html> pada 24 April 2014, pukul 12.31 WIB

<sup>11</sup> A. Lakshamana Chetty, "Evolving India-Southeast Asia Partnership in the Post-Cold War Era", dalam *Dialogue*, July-September 2003, Vol. 5 No.1 diakses dari [http://www.asthabharati.org/Dia\\_jul03/lakshamana.html](http://www.asthabharati.org/Dia_jul03/lakshamana.html) pada 23 April 2014 pukul 23.24 WIB

panjang. Pada 15 September 2002 *First ASEAN Economic Minister and the Minister of India Consultation* telah di laksanakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada pertemuan konsultasi tersebut, menteri-menteri ekonomi dari India dan negara-negara ASEAN sepakat bahwa integrasi ekonomi India – ASEAN mencakup hal-hal seperti: Akses pasar, termasuk penghilangan hambatan tariff maupun non-tariff terhadap perdagangan; Kebijakan-kebijakan fasilitasi dan investasi, seperti penyeragaman standar-standar perdagangan dan investasi, penyederhanaan dan penyeragaman dokumen-dokumen, dan fasilitasi perjalanan bisnis; dan Kebijakan-kebijakan promosi perdagangan dan investasi.<sup>12</sup>

ASEAN dan India menandatangani persetujuan kerangka kerja *Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)* pada tanggal 8 Oktober 2003 dengan maksud untuk menyediakan kerangka kelembagaan yang akan memungkinkan kerjasama ekonomi.<sup>13</sup> Kemudian kedua pihak sepakat untuk menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and ASEAN*. Produk-produk yang telah disepakati akan dikenakan konsesi tariff dicantumkan pada bagian lampiran *Framework Agreement*.<sup>14</sup>

Pada pertemuan ke-21 ASEAN - India *Trade Negotiation Committee (AI-TNC)* di Manila 20-22 Oktober 2008 berhasil diselesaikan beberapa isu terkait negosiasi AIFTA di sektor barang seperti draft perjanjian, *Rules of Origin, Product Specific Rules, Dispute Settlement Mechanism*, Protokol persetujuan kerangka kerjasama ekonomi ASEAN - India dan *Legal Scrubbing*.<sup>15</sup> Dalam perjanjian tersebut membuat tarif yang disepakati antara India dan negara-negara anggota ASEAN dalam

---

<sup>12</sup> Join Press Statement, *The First ASEAN Economic Minister and the Minister of India Consultation*, dikutip dari <http://www.aseansec.org> pada 22 April 2014 pukul 13.20 WIB

<sup>13</sup> Chandrima Sikdar dan Biswajit Nag. *Impact of India-ASEAN FTA Agreement: A cross-Country analysis using applied general equilibrium modeling*.

<sup>14</sup> C.S. Kuppuswamy, "India's Look East Policy: gaining momentum with the Prime Minister's visit", dikutip dari <http://www.saag.org/papers9/papers819.html> diakses pada 20 April 2014 pukul 16.57 WIB

<sup>15</sup> "ASEAN-India Segera Tuntaskan Materi Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas". diakses melalui <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/2112-asean-india-segera-tuntaskan-materi-perjanjian-kerjasama-perdagangan-bebas-.pdf>, di akses pada tanggal 28 Febuari pukul 2014 14.08 WIB

kerangka produk yang masuk dalam Produk Spesifik.<sup>16</sup> ASEAN - India *Free Trade Area* (AIFTA) ditandatangani di Bangkok pada tanggal 13 Agustus 2009, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Singapura. Kemudian menyusul Vietnam, Indonesia dan Myanmar yang memberlakukan kesepakatan tersebut pada 1 Juni 2010.<sup>17</sup> Perdagangan India dengan ASEAN terutama terkonsentrasi di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, keempat negara tersebut tetap menjadi pasar terbesar untuk India. Menjadi satu hal yang penting bagi ASEAN untuk menjalin kerjasama dengan India khususnya di bidang ekonomi terkait dengan *Free Trade Area*, mengingat munculnya India sebagai kekuatan baru di Asia dan dunia dalam berbagai bidang khususnya di sektor ekonomi.

Dengan adanya kerjasama ASEAN - India *Free Trade Area* berguna dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dalam menciptakan pasar yang besar dengan skala kesempatan dan ekonomi yang lebih besar untuk membuka peluang usaha dari para pihak serta meningkatkan daya tarik para pihak terhadap modal dan kemampuan.<sup>18</sup> Indonesia secara khusus sangat berkepentingan atas terlaksananya perjanjian perdagangan bebas ini. India kini menjadi negara ke empat terbesar tujuan ekspor Indonesia. Dengan adanya perdagangan bebas diharapkan dapat memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, untuk meningkatkan produktivitas industri suatu negara agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, penyerapan tenaga kerja lebih banyak dalam upaya meningkatkan kualitas komoditas ekspor suatu negara, perluasan kesempatan untuk mendapatkan investasi modal dari investor asing serta peningkatan kemakmuran dari negara tersebut.

Kebangkitan ekonomi India dari posisi sebelumnya yang hanya terlibat dalam perdagangan bilateral dan perjanjian regional maka pada tahun 2003 India menegaskan keterlibatannya dengan ASEAN, dan dengan tegas India menganut

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Perdagangan Bebas Asean India, dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/220431>, di akses tanggal 1 Maret 2014 pukul 23.54 WIB

<sup>18</sup> Dalam "Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations" Diakses melalui: [http://www.asean.org/images/2012/Economic/AFTA/joint\\_statement/Framework\\_Agreement\\_on\\_Comprehensive\\_Economic\\_Cooperation\\_Between\\_the\\_Republic\\_of\\_India\\_and\\_the\\_Association\\_of\\_Southeast\\_Asian\\_Nations.pdf](http://www.asean.org/images/2012/Economic/AFTA/joint_statement/Framework_Agreement_on_Comprehensive_Economic_Cooperation_Between_the_Republic_of_India_and_the_Association_of_Southeast_Asian_Nations.pdf). Pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 21.11 WIB.

sistem perdagangan multilateral.<sup>19</sup> Kawasan perdagangan bebas ASEAN - India diharapkan dapat memperkuat perdagangan dan investasi antara India dan ASEAN khususnya dengan Indonesia.

## I.2. Rumusan Masalah

Perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) antara Indonesia dan India terus mengalami peningkatan. Adanya masalah dalam perdagangan CPO antara Indonesia – India dapat diatasi seiring berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA). Dari pernyataan diatas maka pertanyaan dari penelitian ini adalah **“Bagaimana perdagangan Crude Palm Oil (CPO) antara Indonesia – India pasca di berlakukannya ASEAN - India Free Trade Area (AIFTA) periode 2010-2013?”**

## I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Memahami bagaimana kerjasama di bidang perdagangan sektor *crude palm oil* (CPO) antara Indonesia dan India.
- Memahami bagaimana kendala perdagangan *crude palm oil* (CPO) sebelum penandatanganan AIFTA.
- Memahami peningkatan nilai ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia ke India pasca diberlakukannya AIFTA.

## I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Secara teoritis, penelitian ini untuk memperkaya penelitian tentang kerjasama ekonomi khususnya perdagangan bebas yang dapat

---

<sup>19</sup> Dhar, Biswajit. “*Strengthening ASEAN-India Economic Relations: The Necessary Steps*”. [http://ris.org.in/images/RIS\\_images/pdf/20-21%20sept%202012%20meeting/Biswajit%20Dhar.pdf](http://ris.org.in/images/RIS_images/pdf/20-21%20sept%202012%20meeting/Biswajit%20Dhar.pdf). Diakses pada tanggal 28 Maret 2014, pukul 21.38 WIB.

dipergunakan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam melengkapi karya tulis.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah khususnya mengenai kerjasama ekonomi perdagangan bebas.

## **I.5. Tinjauan Pustaka**

### **I.5.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi India membuka kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN melalui Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Faisal Idris (2003)<sup>20</sup>**

Dalam Ekonomi Politik Internasional, mereka yang berpendapat bahwa karena perdagangan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka perdagangan dapat mendorong integrasi ekonomi internasional dan pada akhirnya perdamaian dunia melalui kerjasama ekonomi. Adapun penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah penelitian yang berjudul "*Faktor-faktor yang mempengaruhi India membuka kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN melalui Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (2003)*" yang ditulis oleh Faisal Idris. Di dalam penelitiannya, Faisal menjelaskan bahwa kerjasama perdagangan bebas antara India dan ASEAN dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternal sendiri di pengaruhi oleh struktur sistem internasional pasca perang dingin (ekonomi internasional yang ditandai dengan munculnya perdagangan bebas, khususnya yang bersifat regional), adanya kepentingan Cina di Asia Tenggara dan signifikansi ekonomi-politik ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Sedangkan faktor internal sangat dipengaruhi oleh liberalisasi ekonomi India (adanya kepentingan India untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan ASEAN) dan kepentingan India untuk meningkatkan posisi ekonomi politik di Asia Tenggara.

---

<sup>20</sup> Faisal Idris, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi India membuka kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN melalui Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (2003)*", (Depok : 2006)

### **I.5.2. ASEAN-India Economic Relations: Current Status and Future Prospect.<sup>21</sup>**

**Rahul Sen, Mukul G. Asher, dan Ramkishen S. Rajan**

“*ASEAN-India Economic Relations: Current Status and Future Prospect*” dalam artikel ini, Rahul Sen et.al. berupaya memprediksi masa depan dari hubungan ekonomi India - ASEAN. Menurut mereka, hubungan India - ASEAN mengalami signifikansi ketika diadakan ASEAN - India *Summit* yang pertama di Phnom Penh, Kamboja, pada November 2002. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan *summit* tersebut. Pertama, terdapat keinginan dari para pemimpin India untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara ASEAN melalui kunjungan-kunjungan kenegaraan ke beberapa negara ASEAN. Kedua, para pemimpin ASEAN mulai menyadari bahwa mereka perlu mengikat India dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih seimbang dengan *major power*. Ketiga, mulai berkembangnya wacana bahwa struktur perekonomian India secara keseluruhan bersifat komplementer dengan perekonomian negara-negara ASEAN, khususnya dalam sektor manufaktur ringan. Rahul Sen et. Al. juga berpendapat bahwa dengan adanya penandatanganan *Framework Agreement* mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas antara India dan ASEAN, kini terdapat kerangka institusional yang jelas untuk mengoperasionalkan kerjasama ekonomi antara India dan ASEAN.

---

<sup>21</sup> Rahul Sen, Mukul G. Asher, dan Ramkishen S. Rajan, “*ASEAN-India Economic Relations: Current Satatus and Future Prospect*”, diakses dari <http://www.economics.adelaide.edu.au/staff/rrajan/pubs/asean-india.pdf> pada tanggal 24 April 2014 pukul 15.11 WIB

**I.5.3. Decades of Dinamic Diplomatic Relations of Indonesia – India.<sup>22</sup>  
Kementerian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Asia Selatan dan Tengah.**

Selanjutnya pada buku yang berjudul “*Decades of Dinamic Diplomatic Relations of Indonesia - India*” membahas mengenai perjalanan sejarah yang sudah terjadi mengenai kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara Indonesia dan India. China, India dan Indonesia merupakan negara yang pertumbuhannya paling cepat di Asia selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan India mencapai 8 sampai 9%, dan pertumbuhan Indonesia bekisar 6%. Faktanya, pada tahun 2009 ekonomi Indonesia mencapai 4,6% akibat dari *Global Financial Crisis* (GFC). Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,1% dan pada 2011 mencapai 6,4%. Indonesia dan India merupakan negara demokrasi dan dianggap memiliki ekonomi pasar yang dinamis. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan India dalam perdagangan bilateral sudah terjalin cukup lama. Pada era Suharto, tidak ada forum yang mengatur pembicaraan atau diskusi mengenai hubungan ekonomi dan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India, kecuali untuk perjanjian perdagangan. Hanya satu perjanjian ekonomi antara dua negara tersebut yang telah di tanda tangani yaitu *Bilateral Agreement on the Avoidance of Double Taxation* pada Januari 1986. Masih banyak lagi kegiatan yang di lakukan kedua negara guna mencapai kemitraan strategis pada sektor perekonomian. Pada Oktober 2005 presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Pada kunjungannya saat itu Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Manmohan Singh menandatangani *Joint Declaration* untuk mencapai Kemitraan Strategis antar kedua negara. Aspek ekonomi dan komersial pada kerjasama ini meliputi MOU untuk mendirikan *Joint Indonesia - India Study Group* untuk mempelajari kelayakan dari Indonesia - India *Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (II-CECA). Isi buku ini membahas mengenai hubungan perekonomian Indonesia dan India sejak

---

<sup>22</sup> Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Directorate General of Asia-Pacific and African Affairs, Directorate of South and Central Asian Affairs, 2012. *Six Decades of Dynamic Diplomatic Relations of Indonesia and India*.

tahun 2010 dibentuknya *Joint Study Group* dan berlakunya ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA).

## **I.6. Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1. Konsep Kerjasama Internasional**

Dalam pengkajian studi Hubungan Internasional yang mencakup ranah ekonomi politik internasional secara mendasar dapat diartikan sebagai interaksi global antara politik internasional. Untuk menganalisa bagaimana suatu negara dapat berinteraksi dengan negara yang lain, dan menjelaskan proses terbentuknya kerjasama AIFTA maka penulis menggunakan konsep kerjasama internasional yang dapat menghasilkan pengaruh simbiosis mutualisme antara negara yang melakukan kerjasama. Robert Gilpin telah mendefinisikan konsep ekonomi-politik sebagai dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran akumulasi capital, atau kekayaan (ekonomi). Dalam pengertian ini ada timbal balik antara politik dan ekonomi, artinya adalah aktor negara dan pasar saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Walaupun sebagian besar sistem pasar dikendalikan oleh dinamika internalnya, namun pola atau arah selanjutnya secara dominan dipengaruhi oleh faktor eksternal (*exogenous variables*). Variabel tersebut antara lain struktur masyarakat, kerangka politik pada level domestik atau internasional, dan perkembangan teori keilmuan serta teknologi dari negara yang sudah ada.<sup>23</sup>

Dengan mengacu pada landasan pemikiran ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana suatu kondisi pasar dan faktor eksternal saling mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dinamika ekonomi politik internasional. Dengan kerjasama internasional yang terjalin dengan adanya prinsip-prinsip yang mengacu pada peraturan (*organizing principle*) yang digunakan dalam hal yang dianggap multilateral dalam penelitian ini yang meneliti kerjasama dengan

---

<sup>23</sup> Robert Gilpin, "*The Dynamics of Political Economy of International Relations*". Princeton University Press. 1987. Hal. 65

melibatkan banyak negara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam definisi multilateral<sup>24</sup>, yaitu:

Istilah multilateral tidak secara khusus mensyaratkan jumlah negara seperti halnya unilateral, bilateral, trilateral atau universal. Istilah seperti ini menggambarkan rangkaian yang mendasari semua pihak untuk berpartisipasi. Multilateral mensyaratkan banyak aktor, tapi tidak secara spesifik ditentukan jumlah aktornya.

Definisi multilateral memastikan adanya kerjasama, tidak semua kerjasama bersifat multilateral, tetapi semua kegiatan multilateral melibatkan kerjasama. Kegiatan multilateral dapat menjadi tujuan dan alat tergantung bagaimana negara lebih suka melakukan hal-hal yang secara multilateral sehingga multilateral dijadikan basis *cost and benefit*.

Multilateralisme merupakan kerangka kerjasama yang anggotanya lebih dari dua negara (pemerintah masing-masing negara sebagai aktor pelaku hubungan). Jika dalam pendekatan bilateral, kerjasama AIFTA adalah kerjasama antara negara ASEAN dan India dalam bidang perdagangan. Namun faktanya hal ini menimbulkan kompleksitas dalam penyusunan atau penetapan kerangka kerjasama karena dalam ASEAN terdapat beberapa negara yang juga memiliki tingkat kapabilitas yang berbeda terkait hubungan perdagangan secara komperhensif dengan India. Oleh karena itu, India tentu harus melakukan pendekatan kepada tiap negara dalam hal ini khususnya Indonesia yang memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan India khususnya dalam tahapan pembentukan kerjasama perdagangan bebas. Dalam mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut pendekatan multilateral sangat dibutuhkan karena kolektifitas<sup>25</sup> dan saling menghargai kepentingan setiap anggota yang terlibat yang akan berorientasi pada terciptanya *free trade* yang ideal antar dua kawasan.

---

<sup>24</sup> James A. Caporaso, "International Relations Theory and Multilateralism: Search for Foundations" dalam John Gerrard Ruggie (ed.), "Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of Institutional Form." (New York: Columbia University Press, 1993), hlm. 51

<sup>25</sup> Simon Lester dan Bryan Mercurio. "Bilateral and regional Trade Agreement"s. (Cambridge University Press, 2009) hal. 223

### **I.6.2. ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA)**

ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA) merupakan perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan India. Perjanjian kerjasama ini mempunyai tujuan untuk menghilangkan hambatan perdagangan antara ASEAN dan India. AIFTA di tandatangi di Bangkok pada tanggal 13 Agustus 2009, dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Singapura. Yang kemudian menyusul Vietnam, Indonesia dan Myanmar memberlakukan kesepakatan tersebut pada 1 Juni 2010.<sup>26</sup> Dalam AIFTA terdapat beberapa hal yang dapat dinegosiasikan khususnya di sektor barang seperti draft perjanjian, *Rules of Origin*, *Product Specific Rules*, *Dispute Settlement Mechanism*, protocol persetujuan kerangka kerjasama ekonomi ASEAN – India dan *Legal Scrubbing*.<sup>27</sup> Dalam perjanjian tersebut, membuat tariff yang disepakati antara India dan negara-negara anggota ASEAN dalam kerangka produk yang masuk dalam Produk Spesifik.<sup>28</sup> Kerjasama ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA) berguna untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dalam menciptakan pasar yang besar dengan skala kesempatan dan ekonomi yang lebih besar untuk membuka peluang usaha dari para pihak serta meningkatkan daya tarik para pihak terhadap modal dan kemampuan.<sup>29</sup> Dengan adanya AIFTA dapat membuka peluang bagi peningkatan ekspor antara ASEAN dan India.

### **I.6.3. *Crude Palm Oil* (CPO)**

Kelapa sawit merupakan salah satu jenis minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di dunia. Kelapa sawit menghasilkan dua produk turunan yaitu *crude palm oil* atau kelapa sawit mentah dan minyak inti. CPO merupakan

---

<sup>26</sup> *Perdagangan Bebas Asean India*, dikutip dari <http://bataviase.co.id/node/220431>, di akses tanggal 1 Maret 2014 pukul 23.54 WIB

<sup>27</sup> *ASEAN-India Segera Tuntaskan Materi Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas*". diakses melalui <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/2112-asean-india-segera-tuntaskan-materi-perjanjian-kerjasama-perdagangan-bebas-.pdf>, di akses pada tanggal 28 Febuari pukul 2014 14.08 WIB

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations. Op.Cit*

minyak yang efisien dan sangat stabil, CPO digunakan dalam berbagai makanan, kosmetik dan produk-produk kesehatan, dan dapat digunakan sebagai sumber untuk bio-bahan bakar atau biodiesel. Sebagian besar minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari dan banyak hujan untuk memaksimalkan produksi. Sebuah efek samping negatif dari produksi kelapa sawit terlepas dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat karena tingkat tinggi lemak jenuh adalah bahwa bisnis kelapa sawit merupakan pendorong utama deforestasi di negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah yang terbesar penghasil emisi gas rumah kaca setelah China dan Amerika Serikat.<sup>30</sup>

Produksi kelapa sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bersama-sama mencapai sekitar 85% sampai 90% dari total produksi minyak sawit global. Indonesia saat ini merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit di seluruh dunia. Pada jangka panjang, permintaan minyak sawit global menunjukkan tren meningkat sebagai populasi global yang berkembang menimbulkan peningkatan konsumsi produk berbasis kelapa sawit.

Dalam kerjasama perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dan India, jenis kelapa sawit yang di ekspor ke India dan banyak permintaan dari India yaitu jenis CPO atau kelapa sawit mentah. Yang kemudian akan diolah dan menghasilkan produk turunan seperti industri pangan (minyak goreng dan margarine), industri sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternative (biodiesel).

#### **I.6.4. Free Trade Area (FTA)**

Konsep area perdagangan bebas adalah suatu konsep yang diterapkan oleh suatu zona ekonomi yang melibatkan beberapa negara dengan cara tidak menerapkan adanya pajak ekspor – impor atau hambatan perdagangan lain terhadap negara yang tergabung. Dengan membangun kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) yang

---

<sup>30</sup> Indonesia-Investments Palm Oil. Di akses melalui <http://www.indonesia-investments.com/doing-business/commodities/palm-oil/item166> tanggal 13 Juni 2014 pukul 14.15 WIB

bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan kegiatan kerjasama antara India dan ASEAN khususnya Indonesia. Dalam *free trade area* tersebut mengurangi hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi antara Indonesia – India dengan biaya yang lebih rendah, serta meningkatkan perdagangan intra regional dan investasi. Kawasan perdagangan bebas juga dapat dilakukan dalam pembentukan perdagangan bebas pada sektor barang (*FTA in Goods*), jasa (*FTA in services*), dan *Early Harvest Programme*. Dalam *free trade area*, produk-produk yang telah disepakati akan dikenakan konsesi tariff dicantumkan pada bagian lampiran *Framework Agreement*. Dengan adanya area perdagangan bebas diharapkan dapat memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, untuk meningkatkan produktivitas industri suatu negara agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, penyerapan tenaga kerja lebih banyak dalam upaya meningkatkan kualitas komoditas ekspor suatu negara, perluasan kesempatan untuk mendapatkan investasi modal dari investor asing serta peningkatan kemakmuran dari negara tersebut.

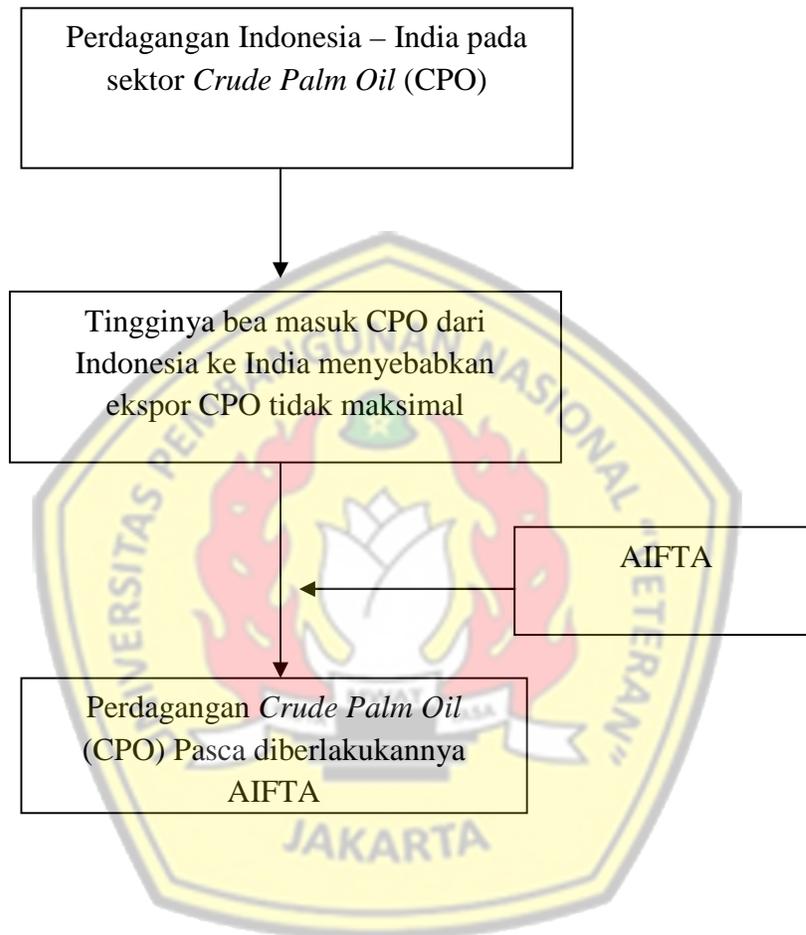
Menurut David N. Baalam dan Michael Veseth<sup>31</sup> menyatakan bahwa integrasi ekonomi regional memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Area* (FTA), dimana negara sepakat untuk menghapus hambatan tariff terhadap perdagangan barang dan jasa. Namun, negara-negara yang terlibat dalam FTA tersebut tetap memiliki hak untuk menetapkan hambatan tariff terhadap produk yang berasal dari negara yang bukan anggota FTA. Kedua, *Customs Union*, dimana negara-negara sepakat untuk memiliki perdagangan bebas tariff antar negara anggota sepakat untuk memiliki seperangkat *Common rules* mengenai hambatan perdagangan eksternal terhadap produk dari negara yang bukan anggota *Customs Union*. Ketiga, *Economic Union*, yaitu negara-negara bersepakat untuk menghapus hambatan tariff dan hambatan non tariff demi menciptakan pasar terintegrasi secara penuh. Negara-negara yang terikat dalam *Economic Union* sepakat

---

<sup>31</sup> David N. Baalam dan Michael Veseth, "*Introduction to International Political Economy*", (New Jersey : Prentice Hall, 1996) hlm.219-220

untuk memiliki empat kebebasan: *Free Movement of Goods, Services, Capital dan People*.

### I.7. Alur Pemikiran



### I.8. Asumsi

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik asumsi bahwa:

- a. ASEAN merupakan pasar yang cukup menguntungkan bagi India dalam melakukan kerjasama perdagangan sehingga India tertarik untuk menjalin kerjasama dengan kawasan yang akan mewujudkan suatu komunitas kawasan.
- b. Kerjasama antara ASEAN - India ini dapat diperkirakan memiliki potensi yang besar untuk menciptakan suatu kerjasama perdagangan bebas yang

baik serta menguntungkan bagi kedua negara dalam merespon dinamika kerjasama perdagangan bebas global.

- c. Pasca diberlakukannya AIFTA, terjadi peningkatan ekspor CPO Indonesia ke India, peningkatan luas area dan peningkatan produksi CPO.

## **I.9. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dan jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Pada jenis penulisan deskriptif, penulis berupaya memberikan penjelasan mengenai bagaimana perdagangan *crude palm oil* (CPO) pasca diberlakukannya kerjasama ASEAN - India *Free Trade Area* (AIFTA).

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan dua jenis data yakni data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentary research*.

### **I.9.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian deskriptif yakni penulis berupaya memberikan penjelasan mengenai bagaimana perdagangan *crude palm oil* (CPO) pasca diberlakukannya kerjasama ASEAN - India *Free Trade Area* (AIFTA).

### **I.9.2. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah

dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentary research*.

### **I.9.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*), artikel jurnal, artikel surat kabar, artikel majalah dan beberapa kajian pemerintahan yang membahas tentang *crude palm oil* (CPO) sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Penulis memperoleh sumber - sumber tersebut dari hasil penelusuran ke beberapa perpustakaan yakni perpustakaan Fisip UPN “Veteran” Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia Depok, Perpustakaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selain menelusuri beberapa perpustakaan penulis juga mengunjungi instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan beberapa hasil kajian penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah dan juga beberapa dokumen – dokumen resmi pemerintah, serta penulis melakukan penelusuran melalui jaringan internet juga dilakukan penulis dalam mencari sumber – sumber artikel yang terkait.

### **I.10. Sistematika Pembabakan**

Untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini dalam 4 bab yaitu:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, alur pemikiran, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II            DINAMIKA HUBUNGAN PERDAGANGAN CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA – INDIA SEBELUM DIBERLAKUKANNYA ASEAN – INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)**

Berisi tentang dinamika hubungan perdagangan *crude palm oil* (CPO) antara Indonesia dan India sebelum melakukan kesepakatan kerjasama ASEAN - India *Free Trade Area* (AIFTA), permasalahan yang timbul dalam perdagangan *crude palm oil* (CPO) antara Indonesia – India sebelum melakukan kerjasama ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA), ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA) dan *Crude Palm Oil* (CPO)

### **BAB III PERDAGANGAN CRUDE PALM OIL (CPO) ANTARA INDONESIA – INDIA PASCA DIBERLAKUKANNYA ASEAN – INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)**

Berisi tentang perdagangan *Crude Palm Oil* (CPO) antara Indonesia – India pasca diberlakukannya AIFTA, bagaimana keuntungan bagi Indonesia, peningkatan ekspor Indonesia ke India, Keuntungan Indonesia dari sisi penerapan bea masuk Indonesia, produk CPO semakin kompetitif dari sisi harga, Peningkatan lahan dan kendala setelah AIFTA (bea keluar naik).

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan atas hasil penelitian terkait kerjasama perdagangan *crude palm oil* (CPO) antara Indonesia – India pasca ASEAN – India *Free Trade Area* (AIFTA) periode 2010 – 2013.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**